

**KARET PALEMBANG:
Perseteruan Pusat dan Daerah Tahun 1950-an**

Oleh:

Ryllian Chandra

*Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada*

Abstracts:

This article discusses the political impact and confrontation as consequences of the central government's efforts to control the rubber trade of Palembang. Rubber was main commodity produced from Palembang that gave economic benefits are not only for Palembang itself but also the national economy. However, the gain from rubber industries was not encourage development in the region. It has risen the demands of regional autonomy and led uprising in some regions.

Keywords: -rubber trade, -central government control, - region autonomy

Pendahuluan

Pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat yang diselenggarakan di Palembang. Kongres Adat tersebut menghasilkan apa yang dinamakan Piagam Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan. Diadakannya kongres tersebut merupakan bentuk reaksi masyarakat dan tokoh-tokoh Palembang dan Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Pusat baik mengenai kepemimpinan nasional maupun kebijakan ekonomi sentralistis yang dianggap banyak merugikan masyarakat di Palembang.

Isi Piagam Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan yaitu 1. pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah dengan adil dan merata. 2. pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah dengan perincian yang jelas mengenai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menghindari sentralisasi dalam pembagian kekuasaan. 3. pemberian otonomi tersebut juga dimasukan mengenai perimbangan keuangan. Melalui pemberian 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah. 4. menuntut Pemerintah Pusat agar lembaga legislatif

terdiri dari dua badan, yaitu parlemen dan Perwakilan senat yang berisikan wakil dari daerah-daerah yang bersangkutan.¹

Isi piagam tersebut merupakan penggambaran dari persetujuan antara pusat dan daerah di Indonesia yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal pokok. *Pertama*, ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan daerah luar Jawa. *Kedua*, representasi politik daerah yang tidak diakomodir dengan baik oleh Pemerintah Pusat sehingga seringkali kebijakan Pusat tidak sejalan dengan keinginan masyarakat di daerah.

Kongres rakyat tersebut mengerucut dengan dibentuknya Dewan Garuda yang berisi orang-orang sipil dan militer. Tujuan dibentuknya Dewan Garuda ialah membawa kepentingan masyarakat Sumatera Selatan dalam menuntut Pemerintah Pusat. Meski dipengaruhi oleh terbentuknya Dewan Gajah di Sumatera Utara dan Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda tidak serta merta melakukan pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintah resmi seperti apa yang dilakukan oleh Dewan Gajah dan Dewan Banteng. Pergolakan-pergolakan di berbagai daerah di Sumatera merupakan reaksi terhadap Pemerintah Pusat yang kemudian di beberapa tempat meletus menjadi bentrokan bersenjata, yang dalam narasi resmi sejarah sering disebut sebagai Pemberontakan PRRI. Meski tuntutan-tuntutan awal terhadap Pemerintah Pusat banyak diproklamirkan di Palembang, tetapi ketika eskalasi konflik telah menjadi pertikaian bersenjata, apa yang terjadi di Palembang justru sebaliknya secara berangsur menjauh dari pusaran pertikaian.

Dalam historiografi kontemporer Indonesia, Palembang seringkali disebut dalam keterkaitannya dengan PRRI. Sudah banyak karya tulis ilmiah yang membahas mengenai PRRI, di antaranya yang paling sering dibahas ialah tulisan dari RZ Leirissa (Leirissa, 1997) ataupun tulisan dari pasangan Kahin, Audrey dan George McTurnan, yang menulis mengenai keterlibatan CIA dalam peristiwa PRRI/Permesta (Kahin dan Kahin, 1997). Baik pasangan Kahin maupun Leirissa menangkap

¹R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 66.

peristiwa PRRI pada aktor-aktor elit terutama dari kalangan militer secara politik. Akan tetapi tidak begitu dalam dibahas bagaimana latar belakang masalah di bidang ekonomi yang mempengaruhi perseteruan antara daerah dan pusat karena terlampau tertuju pada perilaku elit².

Gejolak politik, kontestasi, dan konflik yang pernah terjadi di Palembang tidak lepas konteks politik nasional 1950-an. Meskipun apa yang terjadi di Palembang memperlihatkan kekhasannya sendiri sesuai kondisi Palembang, baik pola konflik maupun penyelesaiannya.

Mengenai konflik terutama gejolak yang mendera Indonesia pada 1950-an, Daniel S. Lev dalam *The Transition To Guided Democracy* melihat hal tersebut disebabkan oleh faktor yang beragam. Meski kebanyakan tuntutan-tuntutan dari daerah tersebut mengerucut pada bentuk pembangkangan dan pemberontakan, tetapi variasi penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat juga ditemukan dalam meredakan konflik-konflik tersebut³.

Salah satu faktor yang dilihat oleh Lev sebagai akar konflik saat itu ialah disparitas ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya di luar Jawa. Kontribusi besar dalam perekonomian nasional dari daerah-daerah luar Jawa sebagai penghasil ekspor meski dengan jumlah penduduk tidak sebesar Pulau Jawa, sedangkan Pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat sebaliknya sebagai daerah pengimpor terbesar secara nasional. Sementara peran besar perekonomian yang berasal dari daerah-daerah luar Jawa tersebut tidak diimbangi oleh keterwakilan politik yang memadai. Dominasi orang-orang Jawa yang berada di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah luar Jawa semakin memercikan kecemburuan dan kegeraman dari masyarakat daerah luar Jawa sehingga faktor ekonomi dan politik tersebut pada akhirnya meledak menjadi pemberontakan.

²Lihat *ibid.*, dan Audrey R Kahin dan George McT. Kahin, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

³Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957 – 1959*, (reprinted edition) (Singapore : Equinox Publishing, 2009).

Apa yang hendak dibahas dalam artikel ini ialah latar belakang terjadinya perseteruan antara Palembang dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini pembahasan tertuju pada ranah ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks Palembang sebagai salah satu pusat perdagangan di selatan Sumatera, serta sebagai salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional di tahun 1950-an. Terutama keterkaitan antara tuntutan perluasan otonomi daerah di pertengahan tahun 1950-an dengan faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Sorotan ditujukan pada perdagangan karet sebagai komoditas utama yang dihasilkan Palembang. Palembang dan daerah sekitarnya menghasilkan ragam komoditas ekspor lainnya seperti kopi dan lada, namun karena karet menjadi komoditas utama penghasil devisa terbesar sehingga pengaruhnya yang besar bagi masyarakat Palembang, dan tarik menarik kepentingan di dalamnya dapat berdampak politis.

Kajian tentang Palembang

Dari pengamatan penulis, setidaknya ada beberapa penelitian yang secara khusus menjadikan Palembang dan Sumatera Selatan pada kurun waktu sebelum Orde Baru sebagai ranah penelitiannya, serta memberikan data-data ekonomi terutama mengenai perdagangan di Palembang. Tanpa bermaksud meminggirkan karya-karya ilmiah lainnya yang menulis mengenai sejarah dan politik Palembang, beberapa hasil penelitian ilmiah ini diajukan karena kedalaman analisa dan signifikansinya dalam penelitian ini.

From Dusun to Market: Native Rubber Cultivation In South Sumatera 1890–1940 dari Bambang Purwanto merupakan historiografi dengan pendekatan ekonomi yang meneliti tentang budidaya karet di selatan Sumatera. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana budidaya dan perkebunan karet rakyat menjadi topangan

struktur ekonomi di Palembang masa kolonial. Melalui *From Dusun To Market*, dapat dilihat bagaimana peran Palembang dalam kepentingan ekonomi internasional⁴.

Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950 karya Mestika Zed merupakan sebuah historiografi yang menyajikan Palembang sejak era kolonial sampai perjuangan revolusi berakhir. Buku ini banyak dijadikan rujukan mengenai sejarah revolusi perjuangan di Palembang. Ada beberapa keunikan tersendiri sejarah yang dihadirkan dalam buku ini. Berbeda dengan apa yang terjadi di tempat lain, jalannya revolusi di Palembang selain digerakan oleh semangat perjuangan juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam penting yang ada di Palembang yakni minyak dan karet. Heterogenitas dan pencampuran budaya di Palembang ternyata ikut mempengaruhi perseteruan di antara unsur-unsur yang berada dalam kubu pejuang.⁵

Hasil penelitian selanjutnya ialah *Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a Region* yang ditulis oleh Woonkyung Yeo. Hasil penelitian disertasi ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara ekonomi dan politik lokal. Dalam disertasi ini dibahas mengenai perkembangan perdagangan komoditas karet dan industri minyak di tahun 1950-an yang mempengaruhi politik lokal. Selain itu, Woonkyung membahas mengenai bagaimana kisah kejayaan Sriwijaya menjadi identitas Palembang dan sekaligus menjadi simbol modernisasi. Meskipun menjadi identitas Palembang dan kemudian diangkat juga menjadi identitas nasional, justru dengan identitas nasional tersebut semangat regionalisme sedikit demi sedikit menjadi pudar.⁶

Selanjutnya ialah *Venesia Dari Timur : Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial* yang ditulis oleh

⁴Bambang Purwanto, *From Dusun to Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890 – 1940*, Disertasi (University of London, 1992).

⁵Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900 – 1950* (Jakarta: LP3ES, 2003).

⁶Woonkyung Yeo, *Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a Region*. Disertasi (University of Washington, 2012).

Dedi Irwanto Muhammad Santun. Studi tersebut membahas mengenai perubahan Kota Palembang. Pembahasan yang menarik sepanjang buku ini ialah bagaimana tarikan kepentingan ekonomi yang mendera masyarakat di Kota Palembang menentukan bentuk dan perkembangan kota tersebut. Simbol-simbol modernisasi berpadu padan dengan simbol-simbol tradisional yang merupakan lapisan atas yang terlihat dari perubahan struktur masyarakat⁷.

Ekonomi Nasional Awal 1950

Sejak Indonesia merdeka, pembangunan ekonomi nasional masih mengalami fragmentasi di mana terdapat perbedaan peran ekonomi yang dilakoni Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini tidak terjadi begitu Indonesia merdeka, tetapi sebagai warisan struktur ekonomi kolonial Belanda yang merancang peran ekonomi di daerah-daerah di negeri jajahannya tersebut. Jawa mengimpor sebagian besar barang dan bertindak sebagai pusat manufaktur, sedangkan pulau-pulau lain, terutama Sumatera dan Kalimantan, daerah-daerah penghasil devisa yang menghasilkan komoditas ekspor yang langsung terhubung dalam sistem perdagangan internasional, terutama dengan Singapura.

Struktur perekonomian Indonesia saat itu adalah sifatnya yang sangat dualistik yang menampilkan perbedaan yang cukup tajam antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional. Sektor ekonomi modern umumnya yakni industri, perkebunan skala besar, pertambangan, keuangan dan perbankan, perdagangan internasional skala besar, dan sektor-sektor lain yang diperlukan dalam jumlah besar investasi modal dan relatif sangat khusus. Setelah kemerdekaan, perdagangan dalam negeri mengalami pertumbuhan pesat, namun daerah penghasil ekspor dan penyerap impor masih dalam kondisi yang sama. Kerenggangan antara daerah penghasil ekspor dan impor ini terus berlangsung karena pemerintah Indonesia

⁷Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

tidak dapat menemukan sumber pendapatan dari sektor lain dan sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Sebagian besar industri yang terletak di Jawa sangat bergantung pada impor bahan baku dan peralatan untuk mengoperasikan bisnis mereka, yang pada gilirannya kebutuhan akan mata uang asing untuk membayar impor tersebut. Sementara itu perekonomian nasional sebagian besar diarahkan untuk produksi dan ekspor sejumlah produk primer perkebunan dan pertanian seperti karet, serta bahan baku dari pertambangan, terutama minyak. Ketika kondisi memasuki tahun 1950, pemerintah mesti merancang perencanaan pembangunan ekonomi dan harus memikirkan sumber penghasilan nasional yang dapat membiayai pembangunan dan mengisi kas negara.⁸

Pendapatan per kapita Indonesia pada 1950 sangat rendah, di bawah \$ 100 per tahun, dengan kemiskinan yang meluas dan tingkat melek huruf hanya sekitar 10% dari jumlah penduduk keseluruhan.⁹ Begitu mengkhawatirkannya kondisi ekonomi nasional saat itu salah satunya disebabkan oleh pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan yang menghancurkan sejumlah besar infrastruktur. Akumulasi modal dan pertumbuhan cenderung terjadi terutama di sektor modern, sedangkan sektor tradisional pada umumnya stagnan dengan relatif mengalami sedikit perubahan dalam teknik produksi. Hampir semua kegiatan produksi ekonomi yang termasuk dalam kedua sektor ini sangat berbeda.

Pada 1950, sektor ekonomi modern menyumbang sekitar 25% dari PDB dan pengaruhnya tentu lebih besar dari itu. Fitur utama dari dikotomi ini adalah bahwa

⁸Berikut ini adalah persentase ekspor Indonesia yang berasal dari karet dan minyak sepanjang dekade 1950-1960. 1950 (karet 43%, minyak 18%), 1951 (karet 51%, minyak 14%), 1952 (karet 45%, minyak 20%), 1953 (karet 32%, minyak 24%), 1954 (karet 31%, minyak 26%), 1955 (karet 46%, minyak 23%), 1956 (karet 39%, minyak 28%), 1957 (karet 37%, minyak 32%), 1958 (karet 33%, minyak 40%), 1959 (karet 45%, minyak 31%), 1960 (karet 45%, minyak 26%). Sumber : K. Thomas dan J. Panglaykim, "Indonesian Exports: Performance and Prospects 1950-1970, Part I", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 5, 1966, h. 73, dikutip dalam William A. Redfern, *Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s*, Disertasi (University of Michigan, 2010), h. 157.

⁹Kurs untuk tahun 1950 nilai Rp 7,6/USD untuk ekspor dan Rp 11.4/ USD untuk impor.

sektor modern hampir seluruhnya dikuasai oleh asing (terutama Belanda), yang berhasil dipertahankan di bawah ketentuan KMB.

Perdagangan Karet dan Kontrol Pemerintah Pusat

Pada 1950, Palembang adalah salah satu pusat ekonomi yang paling penting di Indonesia. Perkembangan ekonomi Palembang pada periode ini mempengaruhi perubahan struktural selanjutnya, terutama dalam kebijakan ekspor karet di Indonesia pasca kemerdekaan. Setidaknya ada dua hal yang mendasari perubahan tersebut. Pertama, produksi karet yang berasal dari perkebunan rakyat melebihi hasil karet yang berasal dari perkebunan karet perusahaan. Lebih dari setengah dari total produk karet nasional berasal dari perkebunan karet milik rakyat. Dengan demikian, daerah-daerah yang didominasi oleh perkebunan rakyat seperti Palembang dan area sekitarnya tumbuh sebagai kontributor utama bagi perekonomian nasional. Namun, karena tidak seperti perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, pemerintah tidak bisa mendapatkan data statistik yang komprehensif atau survei produksi dari perkebunan milik rakyat sehingga tidak terawasi. Kondisi demikian menjadi kesempatan bagi aktivitas penyelundupan yang nantinya berimplikasi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga politik.

Kedua, volume arus perdagangan karet antara Palembang dan Singapura yang mengalami peningkatan. Produksi karet Sumatera Selatan yang selama perang dan revolusi mengalami kehancuran kemudian dapat segera pulih dengan kembali dibangunnya pabrik pengolahan karet. Meskipun demikian, pabrik-pabrik yang baru tersebut tidak menghasilkan lembaran-lembaran karet halus seperti produksi sebelum pecah perang. Ekspor yang berasal dari Palembang baik melalui jalur resmi ataupun penyelundupan karet biasanya masih berbentuk lembaran mentah, berbeda dengan

masa kolonial di mana hasil olahan sudah berbentuk lembaran halus yang lebih mudah diolah oleh industri berbahan baku karet.¹⁰

Hasil produk olahan karet yang kurang sempurna ini menjadi keuntungan bagi industri pengolahan karet di Singapura yang dapat mengolah karet menjadi lembaran halus. Industri pengolahan karet di Singapura yang pernah mengalami kemunduran pada 1930-an akibat dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan karet dengan teknologi serupa di Palembang, pada dekade 1950-an ini mampu bangkit kembali. Para pemilik industri pengolahan karet di Singapura berani membeli karet dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tentu saja semakin meningkatkan aktivitas ekspor dan penyelundupan dari Palembang ke Singapura. Pada saat itu, menyelundupkan karet menjadi salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan bagi para pedagang di Palembang.

Jalur perdagangan Palembang sebagian besar bersandar pada relasi perdagangannya dengan Singapura yang saat itu peran ekonominya semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Singapura menjadi pasar karet terbesar di dunia dengan mendominasi ekspor karet Asia Tenggara untuk negara-negara importir karet. Dengan permintaan yang melonjak serta kenaikan harga karet yang naik maka awal tahun 1950-an merupakan zaman keemasan industri karet. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari industri karet telah menarik banyak orang di Palembang berganti pekerjaan untuk kemudian bekerja di bidang industri karet.¹¹

Melonjaknya kembali permintaan karet dunia disebabkan oleh pecahnya Perang Korea pada 1950. Lonjakan ekonomi yang cukup signifikan bagi perdagangan dan dapat tercapainya nilai surplus pada ekonomi nasional saat itu merupakan

¹⁰Pada 1941, volume ekspor olahan karet dari Palembang sebesar 31.000 ton berbentuk lembaran halus, 47.000 berbentuk selimut karet, dan 7.000 berbentuk lembaran mentah. Terjadi perubahan pada 1951 ekspor olahan karet berbentuk lembaran halus menurun menjadi hanya 7.000 ton, sementara bentuk olahan yang lebih mentah berbentuk lembaran mentah maupun selimut mencapai 69.000 ton. Lihat *Laporan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Inspeksi Perdagangan Sumatera-Selatan untuk Bulan Desember 1950 dan Laporan Bulanan dalam Bulan Agustus 1951*.

¹¹Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Selatan*, Jakarta: 1955, h. 468.

keuntungan yang didapat dari meningkatnya permintaan karet selama awal Perang Korea. Sebagai hasil dari perdagangan karet yang melonjak, di masa keemasan industri karet ini Palembang dibanjiri barang-barang mewah dari Singapura. Barang-barang seperti gramophone, radio, produk-produk nilon dan rayon, jam tangan, pena, sepeda motor, dan mesin jahit menjadi barang-barang yang lumrah dibeli oleh masyarakat yang mendapat berkah dari perdagangan karet.

Akan tetapi, masa kejayaan perdagangan karet tersebut tidak bertahan lama. Kurang dari dua tahun kemudian, perdagangan karet secara berangsur mengalami keterpurukan akibat efek lainnya yang disebabkan oleh perang saudara di Korea. Keterlibatan Tiongkok dalam Perang Korea dengan mendukung Korea Utara telah mendorong Amerika Serikat dan Sekutunya mengusulkan embargo ekonomi kepada PBB. Sebagai salah satu importir karet terbesar saat itu, embargo perdagangan terhadap Tiongkok berpengaruh langsung terhadap perdagangan karet di Palembang.

Pada April 1951, muncul rumor akan adanya larangan perdagangan dengan Tiongkok. Kemudian untuk mengantisipasi akibat terburuk, pada awal Mei 1951 Pemerintah Indonesia segera mengapalkan 8.000 ton karet dalam bentuk selimut, yang 6.000 ton di dalamnya berasal dari Palembang.¹² Akhirnya pada 17 Mei 1951, PBB mengeluarkan resolusi berupa embargo ekonomi terhadap Tiongkok dan Korea Utara, beserta daftar barang yang tidak boleh diekspor ke Tiongkok. Karet menjadi salah satu yang masuk dalam daftar barang yang diembargo, selain senjata, amunisi, energi, dan alat transportasi.¹³

Awalnya pemerintah Indonesia menentang wacana embargo dan berusaha mengeluarkan karet dari daftar embargo, namun kemudian harus mematuhi resolusi PBB tersebut setelah Inggris juga melarang ekspor karet dari semenanjung Malaya dan Singapura ke Tiongkok sehingga agar embargo ekonomi berlangsung adil maka

¹²Pengapalan karet ke Tiongkok pada menit-menit terakhir menjelang diberlakukannya embargo juga dilakukan oleh Singapura. Pada 14 Mei 1951, sebuah kapal kargo yang membawa 1620 ton karet yang hampir berlabuh di Kanton terpaksa kembali ke Singapura. Lihat *Townville Daily Bulletin*, 17 Mei 1951.

¹³*New York Times*, May 18, 1951 dan *Chicago Tribune*, May 18, 1951.

PBB pun juga memberlakukan larangan yang sama bagi Indonesia.¹⁴ Baik Indonesia maupun Singapura kehilangan salah satu pasar ekspor karet terbesarnya, sehingga berakibat pada turunnya harga karet. Para petani karet dan pedagang di Palembang yang menikmati masa keemasan karet yang singkat itu harus menghadapi kenyataan menurunnya penghasilan mereka.

Bagi Palembang hubungan dagang dengan Singapura secara langsung lebih menguntungkan karena kedekatannya dengan Singapura secara geografis yang merupakan pasar karet terbesar di Asia dan jaringan perdagangan antara dua daerah tersebut yang sudah terjalin sejak masa kolonial. Perdagangan karet, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, menjadi sarana penghubung yang berkelanjutan antara Palembang dan Singapura. Ketika Pemerintah Pusat berusaha mengamankan pendapatan hasil perdagangan karet dengan mencoba untuk memotong hubungan jalur tersebut, ketegangan antara pusat dan daerah kemudian muncul tak terelakan.

Dikarenakan karet sebagai komoditi perdagangan utama bagi perekonomian nasional maka pemerintah pusat Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam upaya memotong mata rantai perdagangan antara perusahaan Singapura dan pedagang di daerah penghasil karet dari Indonesia, serta untuk menghentikan ekspor tanpa izin.

Pada April 1950, Djuanda yang saat itu menjabat sebagai menteri kemakmuran pada kabinet RIS menyatakan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam perdagangan karet dengan Singapura harus memiliki izin khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lisensi pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, namun dua bulan kemudian pemerintah pusat mengambil alih kewenangan daerah untuk mengeluarkan lisensi. Menurut pemerintah, alasan kebijakan ini adalah untuk melindungi sumber daya di Indonesia dari modal asing.

¹⁴Data volume ekspor karet ke Tiongkok selama 1948 – 1951 bisa lihat dalam Tzu Nang Chu. *The Port of Hong Kong: A Survey of its Development* (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1973), h. 81 – 87.

Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini justru memicu kritik keras dari elit-elit di daerah. Dalam kolom di *Suara Rakyat Sumatera*, sebuah surat kabar yang terbit di Palembang, A.K. Gani, Kepala Dewan Ekonomi Sumatera Selatan, mengecam kebijakan ini.¹⁵

Menurut mantan Menteri Kemakmuran era Kabinet Sjarir III, Syarifuddin I dan II ini, lisensi merugikan pedagang dan pengolah karet di Palembang. Didasarkan pada kebijakan pemerintah, setiap perusahaan dari Palembang hanya mempunyai izin kuota ekspor 35 ton, sedangkan perusahaan tertentu di Jakarta diberikan izin untuk mengekspor 400 ton lembaran karet dari Palembang ke Singapura meskipun dengan kesepakatan harga lebih rendah. Selain itu, dalam beberapa kasus pedagang di Lampung diizinkan mengekspor lembaran karet dengan jumlah yang lebih besar dari kapasitas produksi karet di daerah itu. Hal ini tentu akan menyebabkan kebocoran jalur karet dari Palembang ke Lampung. Gani menduga bahwa ada suap yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di luar Palembang dengan pejabat pemerintah pusat seraya menilai bahwa kebijakan ini akan menggemukan Pusat (Jakarta).

Mohammad Isa, Gubernur Sumatera Selatan, juga mengeluhkan kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan adanya lisensi ini. Bahkan beliau pergi ke Jakarta untuk mendengar langsung penilaian dari pemerintah pusat. Menurut Mohammad Isa, pemerintah pusat mengakui kesalahannya tetapi tidak akan menarik kembali kebijakan tersebut karena pemerintah pusat tidak mau kehilangan muka.¹⁶

Meskipun muncul banyak keluhan, pemerintah pusat tetap bersikeras tidak merubah kebijakan lisensi dan akan tetap mengendalikan perdagangan karet dari pusat. Tujuan utama pemerintah Indonesia adalah untuk melarang semua

¹⁵*Suara Rakjat Sumatera*, 30 Agustus 1950. Keterlibatan A.K. Gani dalam perekonomian regional Palembang cukup besar. Selain bermain di bisnis minyak, Gani juga berpengaruh dalam bisnis karet. Pada 1954, sebuah perusahaan pengolahan karet bernama N.V. Fabriek Karet Moesi Palembang didirikan di Palembang, dan banyak pihak percaya bahwa perusahaan tersebut dipunyai oleh Gani. Lihat Wookyung Yeo, *Palembang in the 1950s*, h. 45.

¹⁶*Suara Rakjat Sumatera*, 23 September 1950.

perdagangan lembaran karet mentah langsung ke Singapura sehingga Jakarta bisa memproses dan mengekspor semua karet yang diproduksi di Indonesia.

Pada 17 November 1951, setelah bertemu dengan perwakilan dari organisasi pengolah karet di Palembang (P5 - Persatuan Para Pengusaha Penggilingan Palembang) dan para pedagang, Departemen Pertanian mengumumkan bahwa ekspor lembaran karet mentah akan segera dilarang setelah dilakukannya perubahan sistem pengolahan karet untuk memproduksi lembaran halus atau selimut karet daripada lembaran kasar.

Dalam kenyataannya, kapasitas pabrik-pabrik pengolahan di Palembang tidak dapat menampung semua hasil karet untuk diolah menjadi lembaran halus. Setiap bulannya Sumatera Selatan menghasilkan 16.000 ton lembaran karet mentah, sementara pabrik-pabrik pengolah di Palembang hanya dapat memproses kurang dari setengahnya. Menanggapi hal tersebut, pejabat pemerintah mengakui bahwa ekspor lembaran karet mentah ke Singapura tetap tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan karena menghindari penumpukan di Pelabuhan Palembang.¹⁷

Kebijakan pemerintah lainnya ialah mendirikan organisasi semi-pemerintah atau perusahaan yang bertugas mengontrol perdagangan karet. Pada April 1953, Yayasan Karet Rakyat (YKR) secara resmi didirikan oleh pemerintah pusat. Misi dari YKR adalah membangun rumah pengasapan karet, meningkatkan kualitas karet, menanam pohon karet, dan melindungi petani dari perdagangan yang tidak adil¹⁸. Namun, elit lokal menerka bahwa pemerintah pusat bertujuan untuk memonopoli lembaran dan memaksimalkan keuntungan pemerintah pusat melalui YKR tersebut.

Ketegangan antara Jakarta dan Palembang memanasi terkait perdebatan tentang penggunaan pajak tambahan yang dikenakan pada petani produsen karet. Pada Juli 1953, dilaporkan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan untuk menggunakan 40% dari keuntungan pajak tambahan yang dikenakan pada petani

¹⁷*Suara Rakyat Sumatera*, 23 November 1951.

¹⁸Surat kabar di Singapura melaporkan bahwa YKR didirikan dengan modal awal Rp. 40 juta yang hendak digunakan untuk membeli lembaran mentah karet dari para petani. Lihat *No more Palembang rubber to Singapore* dalam *The Straits Times*, 13 Oktober 1953.

karet untuk Kementerian Pertanian di pusat, sambil memanfaatkan 60% dari itu untuk pembangunan daerah.¹⁹ Setelah pertemuan YKR di Jakarta, Nungtjik AR,²⁰ anggota dewan dan Kepala YKR di Palembang, menentang gagasan itu di depan umum dan mengajukan proposal kepada DPRD Provinsi bahwa 100% dari keuntungan harus digunakan untuk petani karet di daerah.²¹

Pengaturan ekspor lembaran karet mentah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada implementasinya tidak berjalan sebagai mana yang dicanangkan sebelumnya. Volume ekspor lembaran karet mentah kenyataannya masih tinggi karena seiring waktu pemerintah begitu banyak mengeluarkan izin. Dari Januari sampai Juli 1954, ekspor lembaran karet mentah dari Palembang ke Singapura mencapai 34.000 ton. Jumlah yang sebenarnya masih sanggup ditampung oleh para pengolah karet di Palembang untuk diolah menjadi lembaran halus dan selimut karet. Justru para pedagang dari Lampung mendapat keistimewaan dari Jakarta dengan mengangkut lembaran karet dari Palembang ke Lampung melalui kereta untuk kemudian mengekspornya ke Singapura. Pemerintah pusat beralasan bahwa para pedagang dari Lampung tidak mempunyai persediaan karet yang mencukupi untuk memenuhi kuota ekspor yang diperbolehkan. Kebijakan lisensi yang kacau ini ironisnya menyebabkan kurangnya pasokan lembaran karet mentah bagi para pengolah di Palembang. P5

¹⁹Lihat *Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 tentang Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet*. Dalam peraturan-peraturan ini perbandingan persentase untuk pusat dan daerah tidak berubah, hanya saja ada perubahan alokasi bagian 40% itu dari Kementerian Pertanian menjadi Dewan Pengurus tetapi pada dasarnya sama yaitu mengarah pada pengelolaan keuangan oleh pusat. Selain tentu saja perubahan pada pengesahan peraturan tersebut oleh menteri pertanian yang dijabat oleh orang yang selalu berbeda tergantung kabinet yang berkuasa di pemerintahan.

²⁰Nungtjik AR., kelahiran Palembang 1910, meninggal 1970, pernah aktif di Partindo dan Gerindo. Beliau juga dikenal sebagai penulis lirik lagu *Gending Sriwijaya*, dan ketika awal Orde Baru lagu ini sempat dilarang karena sempat bergabungnya Nungtjik di PKI. Lagu ini baru boleh diperdengarkan kembali pada 1970 dan sekarang lagu ini menjadi lagu resmi Provinsi Sumatera Selatan. Lihat Margareth J. Kartomi, "The Paradoxical and Nostalgic History of "Gending Sriwijaya in South Sumatra", dalam *Archipel*, Volume 45, 1993.

²¹*Suara Rakjat Sumatera*, 27 Juli 1953.

kemudian mengirimkan gugatan kepada pemerintah pusat agar menghilangkan kebijakan lisensi tersebut.²²

Kebijakan pemerintah pusat terkait perdagangan dan budidaya karet lainnya ialah dengan mendirikan “Naamloze Vennootschap Karet Sumatera Selatan” (NV. Karet) pada September 1954. Sebuah perusahaan semi-pemerintah yang 51% sahamnya berasal dari pemerintah dan 49% berasal dari modal swasta. Sama seperti yang YKR klaim, perusahaan ini menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi petani. Pada Desember 1954, NV. Karet mengklaim bahwa semua lembaran karet yang dibeli untuk pengolahan harus dikontrol oleh perusahaan, dan pembeli harus menjamin harga minimum yang ditetapkan oleh organisasi. Selain itu, NV. Karet bertindak sebagai perantara antara pengolah dan pedagang, sekaligus melakukan inspeksi untuk memeriksa kualitas karet dan menengahi perselisihan terkait nilai karet.²³

Tujuan paling penting dari NV. Karet adalah untuk mengamankan stock lembaran karet yang dihasilkan di Palembang untuk pengolah dari daerah lain, sehingga pada akhirnya melarang ekspor karet ke luar negeri. Itulah mengapa NV. Karet didirikan di Palembang. NV. Karet mengaku dirinya sebagai satu-satunya perusahaan yang mempunyai legalitas membeli dan mendistribusikan lembaran karet di Sumatera Selatan. Setelah pembentukan NV. Karet, pemerintah pusat melarang setiap perdagangan karet dan ekspor oleh swasta.²⁴

Usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan industri karet dengan Singapura melalui NV. Karet tidak berjalan baik. Pembelian dan pendistribusian karet yang dilakukan oleh NV. Karet tidak dilakukan secara efisien, dan berkebalikan dengan keinginan petani sehingga mengakibatkan penumpukan lembaran mentah karet. Penumpukan ini merupakan akumulasi dari pelarangan

²²*Suara Rakjat Sumatera*, 30 September 1954.

²³*Suara Rakjat Sumatera*, 17 Desember 1954.

²⁴Kehadiran N.V. Karet sendiri tidak lepas dari masalah. NV. Karet tidak jarang melakukan permainan harga dan mencatut banyak pungutan dari para pelaku usaha dalam mata rantai perdagangan karet lokal sehingga perbedaan harga dari petani sampai ke eksportir cukup jauh, dan hal ini banyak merugikan petani. Lihat Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur*, h. 185.

ekspor lembaran karet ke Singapura. Penyelundupan karet ke Singapura masih terus berlangsung apalagi setelah kesekian kalinya usaha pemerintah dengan mendirikan perusahaan guna membeli karet petani ternyata menemui kegagalan. Para petani dan pedagang karet lebih suka menjual karet ke Singapura daripada menjualnya kepada NV. Karet. Ada 17 pabrik pengolahan karet di Palembang dan Lampung. Daya tampungnya 21.000 ton per bulan. Sementara itu menurut dewan pengawas industri, produksi lembaran karet mentah mencapai 13.000 sampai 16.000 ton, yang mana NV. Karet baru mampu membeli 13.500 ton.²⁵

Di awal 1955, muncul berita bahwa izin ekspor lembaran karet akan dibuka kembali. Pada Juni 1956, embargo perdagangan karet akhirnya dicabut setelah Prancis dan Inggris memaksa AS untuk mencabutnya. Karet dari Indonesia, Malaya, dan Singapura kembali diizinkan untuk diekspor bebas ke Tionghoa. Baik pemerintah Singapura dan Indonesia berharap dapat mengembalikan hubungan perdagangan dengan Tiongkok, salah satu pengimpor terbesar karet. Namun, peningkatan permintaan karet mengakibatkan tingkat persaingan yang tinggi antara pedagang, juga antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan Singapura.

Usaha pengontrolan daerah oleh pusat melalui NV. Karet ini kembali menimbulkan perseteruan antara pemerintah pusat dengan para elit di daerah. Akan tetapi, kemunculan NV. Karet tidak memancing keributan yang lebih gaduh dibanding seperti saat YKR didirikan oleh pemerintah pusat, selain karena lama kelamaan NV. Karet menjadi lebih mengakomodir kepentingan petani dan pengolah karet lokal Palembang.

Pembentukan dan kegiatan NV. Karet bertepatan dengan Indonesianisasi dan nasionalisasi ekonomi. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menasionalisasi semua modal asing di wilayahnya sehingga tidak hanya modal Barat, tetapi juga modal

²⁵Lihat "R.I. experiment fails so we get rubber", dalam *The Straits Times*, 15 November 1955.

Tionghoa menjadi target kebijakan. Banyak perusahaan milik Tionghoa di Palembang juga ditutup dalam proses ini.²⁶

Pada Juli 1957, NV. Karet mengancam pemerintah pusat karena mengeluarkan lisensi khusus yang memungkinkan pedagang untuk mengekspor 1.800 ton lembaran ke Singapura. Perusahaan ini kemudian mengirim surat ke Departemen Perdagangan, mengungkapkan penentangannya terhadap penerbitan lisensi dan berkeras bahwa lisensi akan membuat pengolah di Palembang terpuruk. NV Karet menentang segala jenis ekspor lembaran karet karena ekspor akan menyebabkan kekurangan lembaran untuk pengolah Palembang.²⁷ alasan lainnya ialah karena kesenjangan modal antara para pengolah dengan bandar karet di Singapura menyebabkan permainan menjadi tidak adil, karena itu pemerintah harus melindungi pengolah karet Indonesia. Jika ekspor lembaran mentah itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi “perang karet” tidak hanya antara pemerintah Indonesia dengan Singapura, tetapi antara pengolah di Palembang dengan Singapura.²⁸

Dalam upaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak perdagangan luar negeri, Pemerintah Pusat membentuk sistem nilai tukar mata uang yang kompleks dengan jumlah nilai tukar yang berbeda tergantung dengan jenis transaksi, sehingga banyak menyulitkan perdagangan. Masalah lainnya ialah bahwa kurs resmi atas Rupiah yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada pajak ekspor terlalu tinggi dibandingkan nilai tukar Rupiah di pasar. Akibatnya para eksportir merasa tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dari perdagangannya yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat ini mengakibatkan pesatnya perdagangan mata uang di pasar gelap, penyelundupan, dan tetap disimpannya pendapatan ekspor dalam bentuk mata uang asing atau tidak melaporkannya kepada kementerian terkait. Dikarenakan koneksi perdagangannya dengan pasar

²⁶Pada 1956, Sumatera Selatan menghasilkan 63,5% (\$143 Juta dari \$225 Juta) ekspor minyak Indonesia dan 36% (\$317 Juta dari \$882 Juta) dari ekspor total nasional. Lihat Kahin dan Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri*, h. 74.

²⁷*Fikiran Rakjat*, 4 Juli 1957.

²⁸*Fikiran Rakjat*, 5 Juli 1957.

internasional, Palembang menjadi salah satu daerah yang terkena dampak dari kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut.

Penyelundupan dan Kecurangan

Dampak dari usaha pemotongan mata rantai perdagangan karet antara Palembang – Singapura ialah maraknya penyelundupan. Penyelundupan karet dari Palembang cukup serius merugikan pendapatan negara dan pemerintah mengumumkan pelaksanaan peraturan untuk menghentikan penyelundupan karet ke Singapura, meskipun sebenarnya cukup naif untuk mengharapkan keberhasilan, apalagi jika dilihat bagaimana relasi yang terbangun sejak lama antara elit di daerah dengan aktivitas penyelundupan terutama di masa revolusi. Politisi dan elit lokal di Palembang sudah sering terlibat dalam penyelundupan dengan Singapura, bahkan pejabat pemerintah acapkali menjadi bagian dari penyelundupan. Penyelundupan karet sering menjadi ihwal ketegangan dan persaingan, tidak hanya antara pemerintah dan penyelundup, tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pedagang.

Sampai paruh pertama 1950-an, penyelundupan karet ke Singapura terus berlanjut bahkan semakin meningkat. Pada 1954, menurut catatan resmi, Malaysia mengimpor karet sebanyak 312.662 ton, padahal menurut pemerintah Indonesia ekspor ke Malaysia yang tercatat hanya 204.305 ton. Perbedaan angka ekspor resmi dengan jumlah karet yang diterima oleh negara lain semakin meningkat di tahun berikutnya. Malaysia menerima 296.000 ton karet, sementara data yang tercatat oleh pemerintah Indonesia hanya 141.662. Artinya bahwa setiap tahunnya lebih dari 100.000 ton karet diekspor tanpa izin atau diselundupkan. Perdagangan tanpa izin resmi lebih sering dilakukan para pedagang karena dapat mengangkut barang jauh melebihi kuota ekspor atau impor serta terhindar dari pajak. Keuntungan besar dari aksi penyelundupan menjadi alasan utama para penyelundup.²⁹

²⁹Wongkyung Yeo, *Palembang in the 1950s*, h. 48.

Menggiurkannya keuntungan dari perdagangan karet telah sejak lama memicu para petani dan pedagang untuk melakukan cara-cara yang tidak wajar. Alhasil banyak kecurangan yang terjadi dalam bisnis karet sejak dari perkebunan. Aksi kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pedagang, tetapi juga oleh para petani karet itu sendiri yang mencampur lembaran karet dengan unsur lainnya seperti kayu, pasir, batu, atau logam untuk menipu pembeli. Guna meminimalisir pemalsuan lembaran karet, pada September 1953 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa lembaran karet yang dijual paling tebal 3 cm atau lebih tipis lagi. Tipisnya lembaran karet dianggap akan mempersulit para petani yang hendak berbuat curang mencampur karet dengan unsur lainnya.

Sesampainya lembaran-lembaran karet di pelabuhan modus operandi penipuan dan kecurangan lainnya dilakukan oleh para pedagang untuk menyelundupkan lembaran-lembaran karet ke Singapura atau Semenanjung Malaya. Cara yang termudah adalah dengan mengelabui para personil bea cukai. Manipulasi dokumen biasanya paling sering dilakukan, muatan yang diangkut sering kali lebih berat dari apa yang tercatat di dokumen. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyelundupan, namun penyelundupan masih terjadi karena peraturan itu sendiri tidak ditegakan oleh para aparat ataupun petugas bea cukai. Korupsi dan suap meluas di kalangan para petugas bea cukai.³⁰

Aksi yang lebih beresiko dilakukan jika muatan langsung diangkut tidak melalui pelabuhan resmi dan langsung membawanya ke Singapura. Di laut para pedagang harus berurusan dengan Angkatan Laut atau polisi. Beberapa penyelundup ada yang membawa lisensi palsu, atau mereka bernegosiasi dengan polisi dengan melakukan penyuapan. Jika upaya negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil, maka tidak ada pilihan lain bagi para pedagang selain mengambil resiko mengelabui

³⁰Pada 3 Juli 1952, seorang pegawai perusahaan Kim Lie yang bernama Lho Ke Sang ditangkap oleh polisi di Palembang. Ia dilaporkan karena berusaha menyuap pejabat pemerintah dengan uang sebesar Rp. 10.000 untuk mempelancar penyelundupan karet dari Palembang ke Singapura. Dalam kasus ini diduga importir dan eksportir Jakarta yang mempunyai cabang di Palembang dan Lampung juga terlibat. Pada pemeriksaan lanjutan, Lho Ke Sang mengakui hendak menyelundupkan sekitar 181 ton karet ke Singapura dengan kapal Kahwa. Lihat Wongkyung Yeo, *Palembang in the 1950s*, h. 30.

penjagaan di laut. Dalam banyak kasus, selat sempit dengan ratusan pulau-pulau memungkinkan penyelundup untuk melarikan diri dari polisi atau patroli Angkatan Laut. Dengan memakai speedboat biasanya para penyelundup bergerak cepat di malam hari, sedangkan jika hari terang sampai menjelang sore mereka bersembunyi di balik pulau untuk menghindari patroli.

Pemerintah Indonesia menemukan lebih banyak lagi kasus penyelundupan yang melibatkan aparat pejabat di daerah yang terlibat dalam memperlulus aksi penyelundupan. Kasus ini menarik perhatian banyak orang di Palembang, namun seperti sudah rahasia umum bahwa hubungan antara penyelundup dan pejabat telah meluas. Hubungan antara pemimpin politik dan militer daerah dengan para pedagang penyelundup yang sudah terjalin sejak revolusi menjadi salah satu penyebab lainnya mengapa penindakan dan pencegahan penyelundupan acap kali tidak berjalan efektif.

Kasus penyelundupan ataupun kebijakan penindakan penyelundupan mengakibatkan perseteruan kekuasaan antara elit, terutama antara pusat dan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat terkait budidaya karet dianggap oleh para elit daerah hanya akal-akalan pusat untuk menyerap penghasilan daerah ke Jakarta. Acap kali kebijakan tersebut tidak didasarkan atas pemahaman teknis yang benar atas kondisi nyata di daerah sehingga cenderung malah akan menurunkan keuntungan dan mengacaukan jalur perdagangan karet yang sudah ada. Di samping itu, keberatan paling pokok ialah karena campur tangan pusat mengusik kenyamanan para elit daerah mendapatkan kesempatan akses ekonomi yang cukup besar dari hubungannya dengan para pedagang penyelundup. Penyelundupan dapat ditempatkan juga sebagai salah satu cara di mana para pemimpin lokal bisa lepas dari kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi mereka.

Kekecewaan masyarakat Palembang terhadap Pemerintah Pusat semakin meningkat setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat yang tidak juga menyelesaikan tuntutan-tuntutan terkait perbaikan ekonomi bahkan semakin memperlihatkan keinginan pusat menguasai pendapatan dari daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 1956 mengenai

perimbangan keuangan dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah (subsidi), dan hasil perusahaan daerah. Daerah merasa dicurangi karena dalam kebijakan tersebut Pemerintah Pusat “mencuri” pendapatan daerah melalui pajak-pajak yang “gemuk”, sementara pajak yang besarnya tidak terlalu besar dipersilahkan untuk diolah oleh daerah.

Implikasi peraturan tersebut tidak merubah kontrol Pemerintah Pusat dalam perdagangan karet di Palembang. Pajak daerah saat itu belumlah mengatur secara rinci bentuk-bentuk usaha dan perdagangan yang memperbolehkan pemerintah daerah memungut pajak. Retribusi daerah yang berasal dari pungutan izin perdagangan karet telah sejak lama diambilalih oleh Pemerintah melalui kebijakan lisensi yang diatur langsung oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, perusahaan daerah masih terkendala dengan infrastruktur dan permodalan dari daerah yang justru sumbernya banyak dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, masyarakat di Palembang merasa bahwa keinginan membangun daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang mereka miliki terasa dihambat oleh Pemerintah Pusat.

Kekecewaan lainnya didapat ialah dengan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1957 mengenai pokok-pokok Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut representasi politik masyarakat daerah hanya terbatas pada DPRD, sementara pimpinan eksekutif di daerah yakni kepala daerah, masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan harus disetujui oleh Presiden. Akibatnya, kepala daerah, terutama gubernur, hanyalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengawasi daerah. Apalagi gubernur Sumatera Selatan pada saat itu dijabat oleh Winarno Danuatmodjo, seorang anggota PNI yang berasal dari Jawa dan ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat.

Tuntutan awal masyarakat dan tokoh-tokoh dari Palembang yang sifat tuntutananya lebih karena faktor ekonomi kemudian ikut terseret menjadi sangat politis dan mengarah ke separatisme karena di dalamnya bercampur baur dengan kepentingan politik partai dan konflik internal AD antara komando pusat dan para

panglima di daerah. Masuknya Palembang dalam pusaran konflik serius antara Pemerintah Pusat dan pihak pembangkang disebabkan karena bertemunya ketidakpuasan dari berbagai pihak dalam satu wadah dengan sasaran yang sama, yakni Pemerintah Pusat.

Sadar dengan tuntutan ekonomi dan perluasan otonomi yang disuarakan daerah, Pemerintah Pusat mulai melakukan pendekatan yang lebih realistis. Setelah melalui serangkaian negosiasi sejak Desember 1956, Pemerintah Pusat setuju untuk meningkatkan otonomi daerah, dan mengirimkan total Rp. 370 Juta bagi Sumatera Selatan dan Rp. 150 Juta untuk Sumatera Tengah guna pembangunan daerah. Selain itu, pusat berjanji akan meningkatkan pelaksanaan undang-undang desentralisasi untuk memberikan otonomi administratif dan fiskal yang lebih besar. Melalui undang-undang itu, jumlah propinsi di Indonesia bertambah dari sembilan menjadi lima belas; kepala distrik akan dipilih oleh dewan-dewan lokal, bukan diangkat oleh pusat; pemerintah kota praja akan dipulihkan kembali di Sumatera Tengah. Pada April 1957, Perdana Menteri Djuanda berjanji akan memperluas proyek-proyek pekerjaan umum di luar Jawa.³¹

Tindakan dari pemerintah yang paling dinanti oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ialah pembangunan. Sejak pertengahan tahun 1950-an wacana modernisasi semakin menggema namun karena realisasinya yang lemah sehingga masyarakat di daerah merasa tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang. Proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan jembatan di pedalaman, terutama di daerah yang banyak menghasilkan komoditas hasil perkebunan mulai diselenggarakan.³² Pembangunan di Palembang dan Sumatera Selatan mengalami hambatan karena selain masalah pendanaan juga masalah kemampuan sumber daya manusia, di mana orang-orang yang ahli dalam bidang pembangunan dan perencanaan daerah sulit ditemukan di Palembang.

³¹Kahin dan Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri*, h. 76.

³²Wongkyung Yeo, *Palembang in the 1950s*, h. 118.

Simpulan

Perbedaan struktur dan kepentingan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya penghasil komoditas ekspor nasional menjadi salah satu penyebab ketegangan antara Pusat dan daerah ketika pengintegrasian ekonomi nasional dilakukan. Palembang sebagai salah satu daerah penghasil karet, komoditas utama ekspor nasional, mesti mengalami ketegangan dengan Pusat terkait dengan kebijakan Pusat yang hendak mengelola keuntungan yang didapatkan dari perdagangan karet Palembang untuk kepentingan nasional. Jalur perdagangan Palembang yang telah berpuluh-puluh tahun tergabung dalam perekonomian global melalui Singapura, kemudian harus menghadapi kondisi di mana pengaturan perdagangan mesti melalui campur tangan Pusat.

Perseteruan ekonomi antara Pusat dan daerah saat pengintegrasian perekonomian nasional menjadi peletup konfrontasi yang lebih meluas sepanjang tahun 1950-an. Masalah identitas dan ideologi yang acapkali didengungkan sebagai penyebab separatisme justru menutup konteks ekonomi yang lebih krusial sehingga ketika separatisme dan pemberontakan tersebut padam melalui peperangan, tidak diikuti dengan proses perbaikan ekonomi. Hal tersebut terlihat di sepanjang periode Demokrasi Terpimpin di mana perekonomian Indonesia terus memburuk.

Meski pada akhirnya Palembang terselamatkan dari pusaran perseteruan antara PRRI dan Pemerintah Pusat. Selepas puncak pergolakan sepanjang 1957-1959, perdagangan karet tidak kembali menuju kondisi yang menggembirakan bagi industri karet di Palembang.³³ Keberhasilan Pusat menarik Palembang dari ajakan bergabung dengan PRRI, salah satunya ditentukan oleh pendekatan ekonomi dalam menghadapi tuntutan masyarakat Palembang. Meskipun tidaklah selalu memuaskan, tetapi di antaranya melalui modernisasi dan pemberian citra identitas nasional dalam simbol-simbol pembangunan dalam perkembangannya kemudian di Palembang tidak muncul kembali gejolak yang berlebihan.

³³Lihat catatan kaki nomor 7 mengenai statistik jumlah ekspor karet nasional.

Daftar Pustaka

- Alfian. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR*. Jakarta: Leknas, 1971.
- Asnan, Gusti. *Memikirkan Ulang Regionalisme: Sumatera Barat 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Collins, Elizabeth Fuller. *Indonesia Betrayed: How Development Fails*. University of Hawai'i Press, 2007.
- Dieleman, Marleen, Juliette Koning, and Peter Post. *Chinese Indonesians and Regime Change*. Leiden: Koninklijke Brill NV., 2010.
- Feith, Herbeth dan Lance Castles (ed.). *Pemikiran Politik Indonesia: 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. (Reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2007.
- Hindley, Donald. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Glassburner, Bruce (ed.). *The Economy of Indonesia: Selected Writings* (reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2007.
- Gould, James W. *Americans In Sumatra*. The Hague: Martin Nijhoff, 1961.
- Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- . *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia. 1928-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kingburry, Damien dan Harry Aveling (ed.). *Authority and Disintegration in Indonesia*. London: Routledge, 2003.
- Leirissa, R.Z. *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Lev, Daniel. S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. The Hague : Kluwer Law International, 2000.

- . *The Transition To Guided Democracy : Indonesian Politics 1957 – 1959* (reprinted edition). Singapore: Equinox Publishing, 2009.
- Masoed, Mohtar. *Ekonomi dan Strategi Politik Orde Baru 1966 – 1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mortimer, Rex. *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 1974.
- Philpott, Simon. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Purwanto, Bambang. *From Dusun To Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890 – 1940*. Disertasi. University of London, 1992.
- Redfern, William A. *Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s* (Disertasi). University of Michigan, 2010.
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad. *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Stoler, Ann Laura. *In The Company's Shadow: Labor Control And Confrontation in Sumatra's Plantation History 1980 – 1979* (Disertasi). Columbia University, 1983.
- . *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. The University of Michigan Press, 1995.
- Tagliocozzo, Erick. *Secret Trades, Porous Border: Smuggling and States Along Southeast Asia Frontier*. Singapore: NUS Press, 2007.
- Woonkyung Yeo. *Palembang in the 1950s: The Making and Unmaking of a Region* (Disertasi). University of Washington, 2012.
- Zed, Mestika. *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900 – 1950*. Jakarta: LP3ES, 2003.